

KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	(1)					
		Disusun oleh/Tanggal	Lisa Sefita					
		Direvisi oleh/Tanggal	Ellinofita					
		Disetujui oleh/Tanggal	Deni Rizal					
Nama SKPD		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Hasil Pengawasan								
a	Ketersediaan Lembar GBS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan di implementasikan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.							
b	Kualitas GBS Program atau kegiatan yang dipilih belum sepenuhnya mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan target-target SDGs Data Pembuka Wawasan yang disajikan tidak menampilkan data terpilah untuk memudahkan pemetaan Resiko untuk pembinaan dalam PUG. Faktor Kesenjangan yang ditampilkan pada Akses dan Kontrol pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak selaras dan tidak menggambarkan parameter kesetaraan gender. Kebijakan yang mewajibkan dan mengatur pelaksanaan PUG dan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender tidak ditampilkan pada GAP dan GBS. Sebab kesenjangan Internal antara GBS dan GPA sudah sama tetapi pada GAP perlu diperbaiki karena belum mengidentifikasi kesetaraan gender Sebab kesenjangan eksternal menurut Tim Reviu adalah kurangnya pemahaman petugas dan pimpinan tentang hal-hal yang harus dijelaskan pada langkah 3 (faktor kesenjangan) pada GAP dan GBS, sehingga faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan external tidak tepat. Revormasi tujuan dan rencana aksi sudah relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan namun belum mengidentifikasi kesetaraan gender Basis data sudah selaras dengan data pembuka tetapi tidak mengidentifikasi kesetaraan gender Indikator kinerja output dan outcome tidak SMART dan belum mengatasi kesenjangan gender							
c	Pelaksanaan GBS Indikator Kinerja output dan outcome yang ditetapkan tidak SMART serta tidak mengatasi kesenjangan gender baik Internal maupun external							
Simpulan								
Data yang disajikan pada GAP dan GBS tidak lengkap dan tidak menggambarkan adanya Parameter Kesetaraan Gender								
Komentar								
Berdasarkan simpulan diatas maka direkomendasikan untuk : Melakukan perbaikan GAP dan GBS, meningkatkan pemahaman tentang PUG, PPRG, GAP dan GBS								

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Nama SKPD : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman

Tahun Anggaran :2019

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
OPD : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman TAHUN :2019 ANGGARAN	
PROGRAM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE PROGRAM	✓ 2.08.2.08.01.02
ANALISIS SITUASI	1. Kegiatan: Pengadaan Peralatan Kerja a. Data Umum Ruangan rapat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana sangat diperlukan karena minimal dua kali sebulan akan dilaksanakan rapat evaluasi kegiatan dengan peserta seluruh korlap, Penyuluh KB , Pegawai kontrak yang ada di 17 kecamatan , ditambah dengan ASN Kabutem yang berjumlah 93 orang. Saat ini terjadi kekurangan sarana dan prasarana, serta ruangan rapat yang tidak representative , sehingga mengurangi kenyamanan Sehubungan dengan hal itu pelaksanaan rapat kurang maksimal karena peserta rapat sering keluar masuk waktu pelaksanaan rapat. b. Faktor Kesenjangan Akses Keterbatasan kursi untuk peserta dan ruangan yang kurang nyaman. Kontrol Belum adanya kotak saran pada DPPKB c. Sebab Kesenjangan Internal Hal ini belum dipandang sebagai permasalahan karena Korlap kecamatan membatasi peserta yang rapat yang akan hadir ,Adanya anggapan peserta rapat yang hadir tersebut cukup Korlap (koordinator Lapangan) tingkat Kecamatan. d. Sebab Kesenjangan Eksternal Rendahnya kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah seolah menjadi hal yang biasa karena biasanya asal urusan selesai, maka masih bisa dianggap hal yang wajar 2. Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Data Umum Kantor DPPKB memiliki ruangan rapat yang setiap saat digunakan untuk rapat staf dan rapat bulanan serta pertemuan dengan para kader – kader KB dengan luas ruangan 10 x 6 meter b. Faktor Kesenjangan Akses Cat dinding dan plafon ruangan rapat pudar dan plafon ada yang retak- retak. Kontrol belum adanya kotak saran di DPPKB c. Sebab Kesenjangan Internal Pejabat terkait belum memahami tentang responsif gender d. Sebab Kesenjangan Eksternal Rapat hanya dilaksanakan 4 kali sebulan sehingga tidak terlalu penting pemeliharannya.

CAPAIAN PROGRAM (Hasil yang ada di tujuan)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 Tahun		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.35.000.000.-		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Kegiatan 1	Masukan	Rp.20.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya kursi rapat sebanyak 40 buah
		Hasil	Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan waktu pelaksanaan rapat .
RENCANA AKSI	Kegiatan 2	Masukan	Rp.15.000.000,-.
		Keluaran	Ruangan rapat dan palponnya dilakukan pemeliharaan cat dan pengantian palpon
		Hasil	Kenyamanan peserta rapat dalam mengikuti rapat meningkat.


KEPALA DPPKB
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dr. H. Aspinuddin
NIP. 1964 0501 1998031001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Padang Pariaman

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan		ISU GENDER		KEBUAKKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kegiatan 1 Pengadaan Peralatan Kerja
1. Kegiatan :pengadaan peralatan kerja	1. Kekurangan /tidak cukupnya kursi rapat untuk rapat bulanan dengan korlap dan Penyuluh KB dan PK Kecamatan dimana kursi ya tersedia di ruangan Rapat hanya 53 buah (Kebutuhan 93). Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa nyaman peserta rapat karena tidak sebagian kursi untuk duduk, Piapon dinding ruangan rapat cat serta dindingnya ada yang rusak penerangannya juga kurang sehingga kenyamanan dan konsentrasi peserta dalam mengikuti rapat agak terganggu	1. Ketebatasan jumlah kursi rapat Kontrol 1. Belum adanya kotak saran terhadap pelayanan tamu rapat	1. Hal ini belum dipandang sebagai permasalahan karena Korlap Kecamatan membatasi peserta yang rapat yang akan hadir 2. Adanya anggapan peserta rapat yang hadir tersebut cukup Korlap (koordinator Lapangan) tingkat Kecamatan.	1. Rendahnya kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah sudah merfakti hal yang biasa karena biasanya asal urusan selesai, maka masih bisa dianggap hal yang wajar	1. Meningkatkan kenyamanan peserta rapat dalam mengikuti rapat bulanan dan mingguan	1. Melakukan koordinasi ke Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian terkait pengadaan, kursi dan perbaikan ruangan Rapat 2. Membuat kotak saran pelayanan gaji	1. Tersedianya pelayanan yang maksimal terhadap 93 ASN/Pegawai Kontrak waktu mengikuti rapat Kekurangan sebesar 40 buah kursi dengan total anggaran yang diperlukan Rp.20.000.000.-	Input :Rp.20.000.000.- Output : Tersedianya 40 Buah Kursi rapat Outcome :Meningkatnya Pelayanan kepada peserta rapat
2. Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							2. Terawatnya ruangan rapat dan plepon ruangan rapat	Output : Ruangan rapat yang bersih dan nyaman Outcome : Kenyamanan / konsentrasi ASN /pegawai kontrak dalam mengikuti rapat
Tujuan : ✓ Terlaksananya Pengadaan kursi rapat di runagan rapat DPPKB ✓ Terlaksananya pencecatan ruangan dan pemeliharaan plafon ruang rapat di DPPKB								

KEPALA DPPKB
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NIP. 1964 0501 1998031001